



Taat karena Membenarkan: Pembenaran Sistem Aparat Pemerintahan Desa dalam Penerimaan Kebijakan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

Mahandra Raditya Putra* dan Wenty Marina Minza

Universitas Gadjah Mada

*E-mail: mahandra.raditya.p@outlook.com

Abstrak

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta memicu konflik pada warga yang terdampak. Meski turut terdampak oleh pembangunan, sebagian besar kepala dukuh memilih untuk menerima bandara. Penerimaan kepala dukuh terhadap pembangunan perlu diteliti untuk menyingkap dinamika pengambilan keputusan aparat pemerintahan desa dalam konflik agraria. Penelitian naratif ini mewawancarai tiga kepala dukuh yang sebagian besar warganya, termasuk diri mereka sendiri, menerima relokasi untuk pembangunan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketaatan partisipan untuk menerima bandara adalah hasil dari pembenaran sistem yang melatarbelakangi pembangunan. Pembetulan sistem partisipan diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, dalam menyikapi proses pembangunan, partisipan mempercayai wacana pemerintah, melakukan rasionalisasi, dan melempar tanggung jawab melalui dalih utilitarian, teknokratik, dan birokratik. Kedua, dalam bertindak sebagai kepala dukuh, partisipan memaknai peran mereka dengan sedemikian rupa sehingga menyokong pembangunan. Ketiga, dalam menilai hasil pembangunan, partisipan bertumpu pada sistem yang ada untuk menyikapi dampak pembangunan. Pembetulan sistem yang membawa mereka menerima pembangunan dijamin dan dibentuk oleh ketergantungan mereka terhadap pemerintah yang ditentukan oleh keamanan karir mereka. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya status dan kepentingan material dalam pembenaran sistem yang menghasilkan ketaatan terhadap kebijakan.

Kata kunci: Bandara Internasional Yogyakarta, kebijakan pembangunan, aparat pemerintahan, ketaatan, pembenaran sistem

Compliance as Justification: Justifying Village Government Apparatus System in Accepting Yogyakarta International Airport Construction Policy

Abstract

Yogyakarta International Airport's (Bandara Internasional Yogyakarta) construction project sparked a conflict between the inhabitants of the affected area. However, most of the hamlet leaders have chosen to accept the project. Their acceptance needs to be scrutinized further to reveal the policy-making dynamics within the village government apparatus in response to agricultural conflict. This narrative research interviewed three hamlet leaders whose denizens had accepted the relocation policy due to the project. This research shows that participants' compliance to the project is a result of the justification of the system behind the reasoning of the construction. The justification involves three elements; First, the participants ended up rationalizing and avoiding responsibilities through utilitarian, technocratic, and bureaucratic pretexts. Second, in acting as hamlet leaders, the participants played into the dutiful role of the supporter of infrastructure development. Third, in evaluating the project's results and addressing its impact, the participants relied on the aforementioned existing system. This justification of the system that led them to accept the project is guaranteed and formed by their dependency towards the government at the risk of their career's security. This research shows the importance of status and material influence in the justification of the hamlet government apparatus system that resulted in policy compliance.

Keywords: Yogyakarta International Airport, development policy, government apparatus, compliance, system justification

Pendahuluan

Sebanyak 1,916 jiwa yang menempati 616 hektar tanah direlokasikan dari tempat tinggal mereka demi pelaksanaan pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Temon, Kulonprogo (Paripurno et al., 2015). Proses pembangunan yang berjalan sejak 2011 ini diiringi oleh berbagai pertentangan yang bahkan mengakibatkan perpecahan antara warga yang menolak dan warga yang menerima YIA (Edita, 2019). Penerimaan warga terdampak bandara tidak terlepas dari status pembangunan YIA sebagai kebijakan pemerintah. Pembangunan aerotropolis YIA masuk ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (Edita, 2019). MP3EI adalah kerangka pembangunan yang bertujuan untuk lebih mengintegrasikan Indonesia ke dalam zona perdagangan bebas Asia Tenggara-Asia Timur (Rachman & Yanuardy, 2015). Pembangunan *aerotropolis* ini juga diharapkan meningkatkan perkembangan industri pariwisata serta memicu “efek domino” yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY, 2017). Dengan demikian, pembangunan YIA dapat dilihat sejalan dengan kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pembangunan YIA dapat mengubah orientasi perekonomian di daerah Temon dari pertanian menjadi industri. Perubahan agraria yang diinisiasi oleh YIA dapat mendorong warga yang sebelumnya adalah petani menjadi pekerja informal (Haekal, 2020). Pekerja informal pada umumnya memiliki jaminan dan kualitas kondisi kerja yang lebih rendah daripada pekerja formal (Habibi & Juliawan, 2018). Meskipun perubahan sedemikian rupa mengancam penghidupan mereka, sebagian warga terdampak menerima pembangunan *aerotropolis* tersebut. Besarnya risiko YIA terhadap warga membuat keputusan untuk menerima pembangunan memiliki beban politik bagi kepala dukuh.

Posisi kepala dukuh sebagai tingkat pemerintahan paling bawah membuat mereka menjadi representasi yang paling dekat dengan warga. Kedekatan demikian membuat sikap mereka terhadap YIA menentukan persepsi warga terhadap pejabat. Fossati (2018) dan Haryanto et al. (2015) menemukan bahwa kepedulian dan pertanggungjawaban pejabat menentukan kepercayaan dan persepsi terhadap akuntabilitas mereka. Dengan demikian, sikap kepala dukuh terhadap YIA dapat menentukan kepercayaan dan persepsi warga terhadap mereka.

Literatur psikologi pada umumnya melihat perilaku ketundukan seseorang sebagai konformitas, *obedience* (kepatuhan), atau *compliance* (ketaatan). Karena konformitas tidak mensyaratkan adanya perbedaan kuasa yang tampak jelas (Meyer, 2021) dan kepatuhan mensyaratkan hilangnya mekanisme seseorang untuk menilai (Milgram, 1974), penelitian ini memilih untuk membahas konstruk ketaatan. Konstruk ketaatan dalam penelitian ini merujuk pada Meyer (2021) yang memiliki empat ciri-ciri. Pertama, adanya pertentangan antara tindakan yang hendak dihindari dengan hasil yang dikehendaki. Kedua, diketahuinya hasil dari tindakan yang dihindari. Ketiga, adanya kesenjangan kuasa yang memproduksi hasil tersebut. Terakhir, adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Literatur yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah literatur yang membahas perilaku ketaatan dengan ciri-ciri tersebut.

Ketaatan yang terjadi dalam relasi antarkelompok dapat dijelaskan dengan teori *system justification* atau pembenaran sistem. Pembenaran sistem didefinisikan sebagai motivasi seseorang untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan sosial yang meliputi mereka sendiri (Jost & Banaji, 1994; Jost, Banaji, & Nosek, 2004). Seseorang termotivasi untuk membenarkan sistem yang ada dalam rangka memenuhi tiga jenis kebutuhan (*needs*), yakni kebutuhan epistemik, kebutuhan eksistensial, dan kebutuhan relasional (Hennes et al., 2012). Variasi dari faktor situasional dan faktor disposisional terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah penentu besaran motivasi untuk membenarkan sistem (Jost, 2019).

Konflik YIA memunculkan pertentangan bagi kepala dukuh, yaitu antara kewajiban untuk berpihak pada warga dan kewajiban untuk taat pada pemerintah. Sebagai bagian dari pemerintahan, sebagian kepala dukuh terdampak memilih untuk menaati kebijakan pemerintah yang memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Legitimasi tidak

hanya ditumbuhkan oleh keberadaan otoritas (Harkin, 2015), tetapi juga dipengaruhi oleh pembenaran atas penggunaan kuasa serta ketergantungan terhadap penguasa tersebut (van der Toorn, 2011). Ketergantungan terhadap penguasa dapat timbul dari apa yang dikatakan Hadiz (2022) sebagai relasi kuasa tidak demokratis yang masih bertahan di tingkat lokal. Relasi sedemikian rupa dapat memunculkan risiko terhadap karier aparatur yang dianggap membangkang oleh atasannya. Stabilitas karier dinilai penting bagi birokrat lokal untuk menjamin kesejahteraan dan status sosial (Ngusmanto, 2016), sehingga dapat dikatakan bahwa kepala dukuh bergantung kepada atasannya setidaknya dalam hal tersebut. Selain diperkuat oleh ketergantungan, pembenaran terhadap sistem menjadi salah satu strategi untuk mengatasi disonansi (Jost, 2017). Dengan demikian, pembenaran sistem dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika keputusan kepala dukuh untuk berpihak kepada pembangunan YIA.

Penelitian ini mencoba untuk mendalami sebab dari penerimaan aparat pemerintahan desa (kepala dukuh) terdampak YIA terhadap kebijakan pembangunan bandar udara tersebut. Penelitian ini berusaha untuk memberi *insight* baru terhadap perdebatan peran status dalam pembentukan legitimasi. Selama ini, perdebatan atas hal tersebut hanya diisi oleh penelitian-penelitian kuantitatif (e.g., Brandt, 2013; Vargas-Salfate et al., 2018). Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif untuk menyingkap dinamika terbentuknya pembenaran sistem dalam suatu kasus. Dengan meneliti dinamika status partisipan yang ambivalen, penelitian ini hendak memperkaya penelitian kualitatif sebelumnya yang hanya menyorot pembenaran partisipan berstatus rendah (e.g., Douglas, 2016; Durrheim et al., 2014; Godfrey & Wolf, 2016). Dengan demikian, peran pembenaran sistem dalam legitimasi pembangunan dapat digambarkan secara lebih komprehensif.

Metode

Peneliti ingin menggambarkan pengalaman partisipan sebagaimana yang dituturkan oleh partisipan itu sendiri. Pengalaman tersebut perlu dipahami secara bersamaan dengan konteks temporal yang menyertainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif. Penelitian naratif dalam penelitian ini merujuk pada Crossley (2007) dalam tahapan-tahapannya, serta Murray (2003) dalam analisisnya.

Lokasi Penelitian

Para partisipan penelitian ini bertempat tinggal di tiga perumahan relokasi khusus warga terdampak YIA untuk tiga dukuh yang berbeda. Untuk menjaga kerahasiaan, ketiga dukuh tersebut menggunakan nama samaran “Argo”, “Tirto”, dan “Rejo”. Duku Rejo bertempat di Kalurahan Palihan, dan Duku Tirto serta Duku Argo bertempat di Kalurahan Glagah. Kedua kalurahan ini adalah bagian dari Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung membuat wawancara dilakukan secara daring. Selama wawancara daring berlangsung, peneliti berada di kediamannya di Sleman, DIY, sedangkan partisipan berada di kediaman mereka, di kantor Kelurahan, atau di tempat lain. Wawancara luring yang dilakukan pada salah satu partisipan bertempat di teras kediamannya dengan turut menerapkan protokol Covid-19.

Partisipan Penelitian

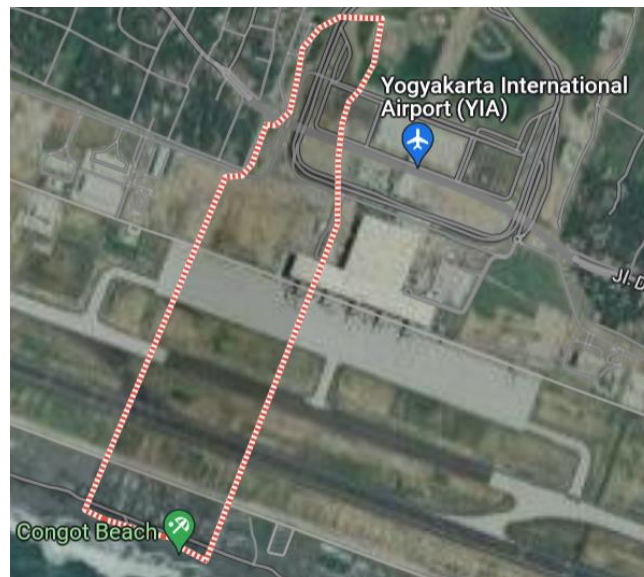
Partisipan dalam penelitian ini adalah kepala dukuh di pemukiman relokasi aerotropolis YIA. Warga pemukiman relokasi dipilih karena mereka yang bertempat tinggal di pemukiman tersebut adalah warga terdampak yang sejak awal tidak menolak YIA. Terdapat tiga kepala dukuh yang berhasil diwawancarai oleh peneliti. Nama dari masing-masing kepala dukuh disamarkan dalam pengodean data dan penulisan laporan penelitian menjadi Budi, Raharjo, dan Slamet. Selain menjabat sebagai kepala dukuh, semua partisipan mengaku juga aktif sebagai petani.



Gambar 1. Lokasi bekas Dukuh Argo. Diambil dari Google, 2023a. Hak cipta 2023 oleh Google.



Gambar 2. Lokasi bekas Dukuh Tirto. Diambil dari Google, 2023b. Hak cipta 2023 oleh Google.



Gambar 3. Lokasi bekas Dukuh Rejo. Diambil dari Google, 2023c. Hak cipta 2023 oleh Google.



Gambar 4. Lokasi salah satu perumahan relokasi partisipan. Diambil dari Google, 2020. Hak cipta 2020 oleh Google.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur. Hiles et al. (2017) berpendapat bahwa wawancara tak terstruktur dan semiterstruktur mendorong partisipan untuk memberikan data yang bersifat naratif. Wawancara yang dilakukan berjenis episodik agar dapat menghemat waktu partisipan. Wawancara episodik adalah wawancara yang berfokus pada satu atau sejumlah kejadian penting dalam hidup (Murray, 2003). Kejadian penting yang menjadi fokus dalam wawancara ini adalah pengangkatan sebagai kepala dukuh dan proses penggusuran untuk YIA.

Terdapat berbagai kiat yang perlu dilakukan peneliti untuk melakukan wawancara secara aman dalam situasi pandemi Covid-19. Pertama, wawancara dilakukan di ruang terbuka karena ruangan tertutup berisiko penularan tinggi (Lu et al., 2020). Kedua, wawancara dilakukan dengan menjaga jarak setidaknya 1.8 meter sesuai arahan Centers for Disease Control and Prevention (2020). Ketiga, baik peneliti maupun partisipan menggunakan masker selama wawancara sesuai dengan saran Chu et al. (2020). Keempat, wawancara dilakukan secara daring apabila memungkinkan. Terakhir, peneliti diusahakan menjalani karantina mandiri selama dua minggu setelah pengambilan data. Selain kiat-kiat tersebut, peneliti juga harus mengikuti ketentuan lain yang diwajibkan otoritas terkait.

Penelitian dilakukan secara daring melalui WhatsApp sesuai dengan preferensi partisipan. Kompensasi disesuaikan dengan besaran kuota internet yang dihabiskan selama wawancara, dan diberikan setelah penelitian usai. Proposal penelitian dan skema kompensasi telah disetujui oleh Komite Etik Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan nomor surat izin 861/UN1/FPSi.1.3/SD/PT.01.04/2021.

Tabel 1. Data Demografi Partisipan Saat Penelitian Dimulai

Nama partisipan (samaran)	Dukuh (samaran)	Kalurahan/ desa	Usia	Lama menjabat
"Budi"	"Tirto"	"Glagah"	43 tahun	5 tahun
"Raharjo"	"Argo"	"Glagah"	50 tahun	10 tahun
"Slamet"	"Rejo"	"Rejo"	55 tahun	30 tahun

Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian naratif menurut Crossley (2007) terbagi ke dalam enam tahapan. Pertama, peneliti membaca ulang transkrip yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Kedua, peneliti memahami konsep utama dari narasi, yakni *narrative tone*, *imagery*, dan tema. Ketiga, peneliti mengidentifikasi *narrative tone* dari teks yang ada. Keempat, peneliti mengidentifikasi *imagery* dan tema dari teks secara bersamaan. Kelima, peneliti menata berbagai *images* dan tema yang ada dalam suatu cerita yang berkesinambungan. Keenam, peneliti menulis laporan penelitiannya. Dalam penulisan transkrip, tiap baris dari percakapan partisipan diberikan kode yang tersusun dari nama partisipan, urutan wawancara, dan urutan baris tersebut. Misalnya, sebuah kutipan dengan kode BUDI_01_10 menunjukkan bahwa kutipan tersebut berasal dari wawancara pertama dengan Budi, pada baris kesepuluh.

Keabsahan data diuji melalui proses triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *time triangulation* dan *triangulation by multiple sources*. *Time triangulation* dilakukan dengan mewawancarai partisipan dalam lebih dari satu waktu (Satori & Komariah, 2013) dan *triangulation by multiple sources* dilakukan dengan mewawancarai lebih dari satu partisipan (Denzin, 1978). Dengan demikian, peneliti dapat menguji keabsahan keterangan yang disampaikan oleh partisipan.

Hasil dan Pembahasan

Ketaatan kepala dukuh terdampak untuk menerima pembangunan YIA adalah hasil dari pembenaran mereka terhadap sistem yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Pembenaran sistem mereka terlihat dari tiga hal. Pertama, dalam menyikapi pembangunan, partisipan tidak kritis dan melempar tanggung jawab ke jajaran di atas mereka. Kedua, dalam bekerja sebagai kepala dukuh, partisipan menyesuaikan makna tugas mereka dengan tuntutan YIA. Ketiga, dalam menyikapi keadaan setelah pembangunan, partisipan masih mendasarkan sikap mereka ke sistem yang berlaku. Semua partisipan membenarkan sistem yang melatarbelakangi YIA meski terdapat perbedaan ketergantungan terhadap sistem tersebut.

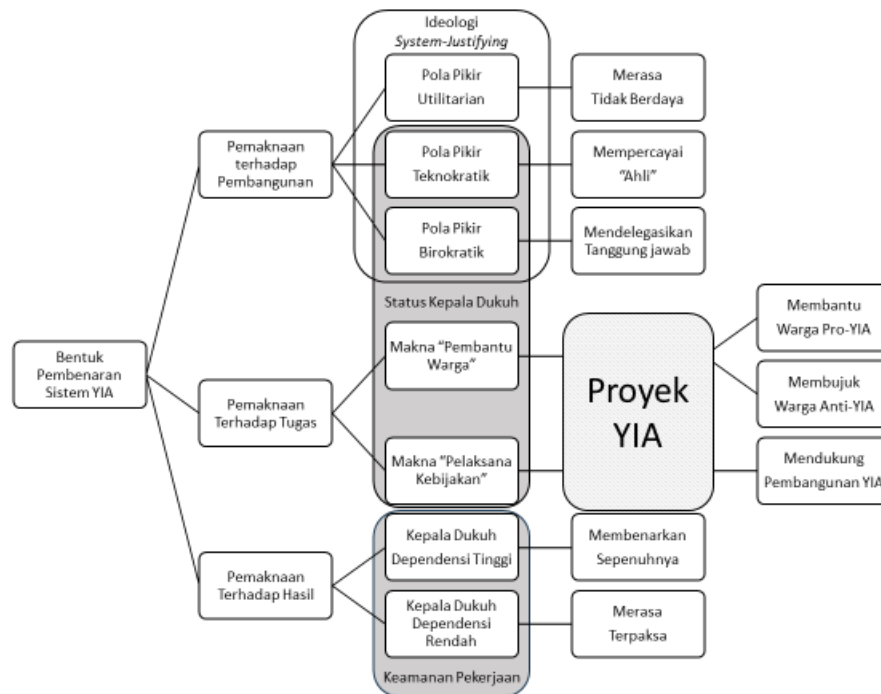
Kepala dukuh terdampak melihat pembangunan YIA sebagai pemenuhan kepentingan umum. Semua partisipan percaya bahwa DIY membutuhkan bandara baru dengan kapasitas yang lebih besar (SLMT_02_99; BUDI_03_182). Penerimaan wacana tersebut menyiratkan adanya kepercayaan bahwa pemerintah mengetahui pilihan yang terbaik bagi warga dan kebijakan yang diterapkan dapat membawa manfaat bagi orang banyak.

Pengutamaan terhadap kepentingan mayoritas dapat dilihat sebagai bentuk pola pikir utilitarianistik. Utilitarianisme adalah pandangan bahwa keputusan yang benar adalah yang mendatangkan manfaat terbaik bagi mayoritas (Kay, 2018). Wacana bahwa YIA adalah kepentingan umum pun membuat Slamet merasa tidak berdaya:

“Kalau ditarik ya gak mau. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan umum ya... walaupun bagaimana mesti... kalah.” (SLMT_02_101 – SLMT_02_102).

Pandangan Slamet bahwa kebijakan pemerintah merepresentasikan kepentingan umum menunjukkan pembenarannya terhadap sistem tersebut. Pembenaran sistem Slamet membuatnya kehilangan efikasi politik yang merupakan salah satu penentu utama dalam partisipasi aksi kolektif (Corcoran et al., 2015; Milfont et al., 2022; Zeng et al., 2018). Dengan kata lain, ketidakberdayaan Slamet berangkat dari pembenarannya terhadap sistem.

Pendapat partisipan bahwa pemerintah telah mengetahui pilihan yang terbaik dalam pembangunan YIA hanya didasari oleh perkiraan mereka semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil dari usaha rasionalisasi. Kepala dukuh terdampak merasionalisasikan pemilihan Temon untuk YIA dengan pola pikir teknokratik. Teknokrasi dapat diartikan sebagai penempatan ahli sebagai penguasa (Scott, 2015). Meski tidak lagi berperan sentral



Gambar 4. Struktur pembenaran sistem partisipan terhadap pembangunan YIA

dalam politik nasional di Indonesia (Takashi, 2014), pola pikir teknokratik memberi kerangka bagi partisipan untuk membenarkan pemilihan lokasi YIA.

Pendapat partisipan bahwa pemerintah telah mengetahui pilihan yang terbaik dalam pembangunan YIA hanya didasari oleh perkiraan mereka semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil dari usaha rasionalisasi. Kepala dukuh terdampak merasionalisasikan pemilihan Temon untuk YIA dengan pola pikir teknokratik. Teknokrasi dapat diartikan sebagai penempatan ahli sebagai penguasa (Scott, 2015). Meski tidak lagi berperan sentral dalam politik nasional di Indonesia (Takashi, 2014), pola pikir teknokratik memberi kerangka bagi partisipan untuk membenarkan pemilihan lokasi YIA.

Bagi partisipan Budi, rasionalisasi teknokratik berkaitan dengan rasa inferioritasnya. Budi merasa sebagai warga yang “kurang berpendidikan”, ia harus menuruti pihak yang lebih ahli. Seperti pendapat Neal et al. (2016), warga yang merasa tidak mempercayai diri mereka sendiri tampak terdorong untuk mempercayai institusi. Inferioritas yang turut difasilitasi dengan pola pikir teknokratik tersebut membuat Budi mempercayai pemerintah yang ia lihat sebagai “lebih berpendidikan”.

Budi sudah mendukung pembangunan YIA sebelum menjabat sebagai kepala dukuh. Ia memulai kariernya pada 2016 dengan maksud “mempersiapkan warga menghadapi YIA”. Hal ini disebabkan karena ia merasa YIA dapat memajukan perekonomian Temon melalui “efek domino” atau yang lebih umum disebut sebagai efek “*trickle down*” (tetes ke bawah). Efek tetes ke bawah adalah salah satu wacana utama pemerintah untuk melegitimasi YIA (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY, 2017). Namun, efek tersebut tidak pernah terealisasi di DIY (Luthfi, 2019). Meskipun tidak terbukti, pemahaman tersebut menjadi justifikasi bagi Budi untuk menerima pembangunan YIA.

Tidak kritisnya kepala dukuh terdampak juga terlihat dalam penggunaan pola pikir birokratik untuk memindahkan tanggung jawab. Birokrasi dapat diartikan sebagai pembagian kerja yang tertata dalam rantai komando hierarkis (Weber, 2015). Slamet dan Raharjo merasa atasan mereka lebih bertanggung jawab untuk memastikan pihak

pembangun YIA yakni perusahaan Angkasa Pura I (AP I) benar-benar menepati janji untuk mempekerjakan warga terdampak. Pada akhirnya, keduanya merasa AP I tidak menepati janji dengan penuh. Hal ini karena atasan mereka tidak mengubah janji lisan tersebut menjadi janji yang mengikat secara legal-formal. Sementara itu, Budi menggunakan dalih birokratis untuk membatasi tanggung jawabnya sebagai pembantu warga. Menurut Budi, ia hanya cukup menyampaikan tuntutan warga, sedangkan keputusan akhir diserahkan kepada atasannya yang lebih berhak. (BUDI_03_310 – BUDI_03_318). Kedua kasus tersebut sesuai dengan pendapat Brannigan dan Perry (2016) bahwa pembagian kerja birokratik dapat mengaburkan konsekuensi dan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh seseorang sehingga menjamin ketaatan.

Pola pikir partisipan dalam menerima YIA menunjukkan bahwa teknokrasi dan birokrasi dapat menjadi ideologi status yang membenarkan sistem. Ideologi status dikonstruksi oleh masyarakat untuk menjelaskan sistem sosial mereka (Major, 2007) dan penjelasan tersebut dapat mengukuhkan sistem masyarakat itu sendiri (Jost & Hunyady, 2005). Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik melihat teknokrasi sebagai ideologi *system-justifying*, kepercayaan yang tinggi terhadap institusi ditemukan berhubungan dengan rendahnya persepsi risiko (Vainio et al., 2014). Sementara itu, pola pikir birokratis dapat menghindarkan seseorang dari merasa bertanggung jawab penuh terhadap keputusan mereka (Brannigan & Perry, 2016). Dengan demikian, kedua pola pikir tersebut dapat menghalangi kepala dukuh untuk dapat bersikap kritis dan bertanggung jawab.

Pengadopsian pola pikir teknokrasi dan birokrasi menunjukkan bahwa status objektif (jabatan partisipan) dapat mengintroduksi ideologi *system-justifying* kepada anggotanya. Temuan ini menggambarkan lebih lanjut hubungan antara status objektif dengan pembenaran sistem yang selama ini hanya dijelaskan sebagai hubungan korelasional (Li et al., 2020; Valdes et al., 2022). Berdasarkan pengalaman Slamet, ideologi *system-justifying* membuatnya tidak memiliki efikasi politik. Hal ini membuat keanggotaan dalam kalurahan bertolak belakang dengan keanggotaan organisasi sukarela dalam Corcoran et al. (2015) yang justru meningkatkan efikasi politik.

Status aparat pemerintahan tidak hanya memberikan pola pikir birokratik dan teknokratik, melainkan juga pemaknaan atas tugas mereka serta ekspektasi atas implementasinya. Semua partisipan memaknai kepala dukuh sebagai pembantu warga sekaligus pelaksana kebijakan pemerintah (SLMT_01_50; BUDI_03_79; RHRJ_01_63). Sebagai pembantu warga, mereka merasa bertugas sebagai penjaga kerukunan dan pembantu urusan-urusan sosial atau birokratik. Sementara sebagai pelaksana kebijakan, mereka cenderung melihat diri mereka hanya sebagai pemberi informasi dari pemerintah ke warga.

Peran sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pada akhirnya lebih diutamakan kepala dukuh saat berhadapan dengan YIA. Pengutamaan ini terlihat dari disesuaikannya makna “menjaga kerukunan” dan “membantu warga” agar mendukung pembangunan. Implementasi pro-YIA lebih terlihat dalam sikap Budi dan Raharjo. Bagi mereka, penolakan warga merupakan sumber konflik. Budi dan Raharjo menganggap warga penolak YIA kurang memahami potensi ekonomi bandara. Oleh karena itu, keduanya mengaku aktif dalam membujuk mereka untuk menerima pembangunan. Di sisi lain, aspirasi warga yang menerima YIA justru difasilitasi oleh mereka.

Berbeda dari Budi dan Raharjo, Slamet lebih bersimpati dengan warga penolak YIA. Sebagai kepala dukuh yang hendak pensiun, Slamet merasa penghidupannya turut terancam oleh kehadiran YIA. Namun, selain tidak memiliki efikasi politik, ia hanya mempercayai saluran resmi dalam penyampaian aspirasi. Kepercayaan ini terlihat dari harapannya terhadap Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) untuk dapat menindaklanjuti janji YIA. Kepercayaan terhadap sistem membuat seseorang cenderung memilih saluran partisipasi resmi dalam berpolitik (Hooghe & Marien, 2013). Karena sistem yang ia anggap sebagai satu-satunya cara terhalang untuk melakukan penolakan, Slamet pun merasa semakin tidak berdaya.

Sikap Slamet yang menyangsikan pembangunan YIA berkaitan dengan latar belakangnya sebagai kepala dukuh yang telah menjabat selama lebih dari tiga puluh tahun. Status subjektifnya sebagai pegawai yang hendak pensiun membuat Slamet memosisikan diri lebih sebagai warga daripada pejabat pemerintahan, dan menuturkan kehadiran YIA sebagai pembawa kesulitan ekonomi bagi mereka. Penuturannya dapat dilihat sebagai wujud kekhawatiran akan nasibnya sendiri setelah meletakkan jabatan. Kepentingan material adalah penentu yang kuat dari sikap terhadap kebijakan (Weeden & Kurzban, 2017). Oleh karena itu, Slamet tampak memperhitungkan kepentingan materialnya di masa depan dalam menentukan sikap terhadap YIA.

Sikap Raharjo, meski bertentangan dengan sikap Slamet, juga menandakan pentingnya ketergantungan terhadap pemerintah dalam menghadapi YIA. Raharjo adalah mantan petinggi kelompok tani yang telah menjadi kepala dukuh sejak sepuluh tahun yang lalu. Kepentingannya sebagai petani tersebut sempat menghambatnya untuk menerima YIA. Namun, dengan dalih bahwa pemerintah adalah pemberi kerjanya, Raharjo pun memilih untuk menerima wacana pemerintah dan aktif mendatangi warga agar turut mendukung YIA.

Kecenderungan Raharjo untuk mengidentifikasi diri sebagai aparat pemerintah daripada petani memperlihatkan bahwa kepentingan material memiliki andil yang penting dalam menentukan sikapnya (Lerman & McCabe, 2017). Meskipun kepentingannya sebagai petani terancam dengan kehadiran YIA, ia masih memiliki *job security* yang lebih mapan dibandingkan dengan Slamet. Sebagaimana yang ditemukan oleh Ma et al., (2016), *job security* dan identifikasi yang kuat memungkinkan seseorang untuk berperilaku ekstra sebagai bagian dari organisasi. Risiko YIA yang diperkecil oleh *job security*, diikuti dengan identifikasi diri sebagai aparat pemerintah, tampak membuat Raharjo memutuskan untuk mendukung pembangunan bandara.

Ketergantungan Raharjo terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja tampak turut menentukan sikapnya terhadap keadaan pasca pembangunan YIA. Ketika YIA dianggap tidak menepati janji untuk mempekerjakan warga lokal secara penuh, Raharjo tampak mengalami disonansi. Hal ini terlihat dari keengganannya untuk menceritakan sikapnya pasca-YIA dan mengklaim bahwa “tidak ada masalah” di daerahnya, meski mengakui bahwa janji tersebut adalah “palsu”. Situasi ini bertentangan dengan argumen YIA yang ia dukung, sehingga pembahasannya ia hindari. Menurut penelitian Nam et al., (2013) penghindaran adalah reaksi yang umum terhadap situasi yang memunculkan disonansi.

Pembenaran Budi terhadap YIA berlanjut bahkan setelah berhadapan dengan belum optimalnya peningkatan ekonomi pascapembangunan. Meskipun Budi mengakui bahwa warga membutuhkan perubahan nyata dan tidak adanya perubahan yang dibawa YIA bagi warga ber perekonomiannya rendah, Budi memaklumi keputusan YIA untuk tidak mempekerjakan semua warganya. Ia justru membingkai masalah tersebut sebagai warga ber perekonomiannya rendah yang kurang dapat memanfaatkan peluang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala dukuh dengan status subjektif yang lebih tinggi lebih membenarkan sistem dalam menghadapi YIA, seperti pada temuan Li et al. (2020). Status subjektif Slamet sebagai aparat yang hendak pensiun membuatnya lebih mengkhawatirkan masa depannya sehingga menyangsikan pembangunan YIA. Sebaliknya, Budi dan Raharjo yang masih bergantung pada pemerintah dan memiliki jabatan yang lebih stabil membenarkan pembangunan YIA sampai akhir. Perbedaan ini menegaskan pentingnya ketergantungan pada kelompok penguasa terhadap pembenaran sistem, persepsi keadilan, serta niat kerja sama publik (van der Toorn, 2011; Zhang & Zhou, 2018). Dengan diketahuinya perbedaan ketergantungan sebagai hasil dari perbedaan status subjektif, maka penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi kepentingan dapat mendahului pembenaran sistem,

Perbedaan kepentingan membuat tiap partisipan membenarkan sistem pascapembangunan YIA secara berbeda pula. Harapan Slamet pada BPK dapat menunjukkan bahwa korelasi ketidakberdayaan dan pembenaran sistem (van der Toorn et al., 2015) adalah bentuk dari usaha mengatasi ketidakberdayaan. Sementara itu, keadaan

pascapembangunan yang kurang ideal memicu disonansi bagi kepala dukuh pro-YIA. Pemakluman Budi terhadap keputusan YIA dan klaim Raharjo bahwa “tidak ada masalah” pascapembangunan dapat menunjukkan dorongan pembenaran yang kuat akibat kegagalan sistem yang jelas (Wilkinson-Ryan, 2020). Teguhnya pembenaran Budi dan Raharjo memperlihatkan sejalanannya pembenaran sistem dengan pembenaran ego atau kelompok mereka (Jost, 2019) sebagai aparat pemerintahan desa.

Keterbatasan penelitian ini adalah kurang dalamnya telaah terhadap relasi antara partisipan dengan monarki DIY, warga mereka, ataupun dengan keluarga mereka sendiri. Dalam penelitian daring yang tidak bisa memakan waktu lama dan sulit menjamin keamanan partisipan, peneliti tidak dapat menyelidiki lebih lanjut kaitan antara penerimaan partisipan dengan persepsi terhadap Kadipaten Pakualaman. Kadipaten adalah salah satu monarki yang berkuasa di DIY yang mengklaim 161 hektar dari 645.63 hektar lahan calon YIA (Dewi & Salim, 2020). Klaim tersebut didasari oleh bangkitnya kembali peraturan warisan Hindia Belanda atas tanah swapraja melalui Undang-undang Keistimewaan (Antoro, 2015). Klaim Kadipaten menuai masalah karena sebelum pembangunan, 161 hektar lahan tersebut digarap masyarakat dengan aktif (Dewi & Salim, 2020). Rentannya intimidasi terhadap individu yang dianggap bertentangan dengan monarki (AJI Indonesia, 2021; Kamim, 2021) memperlihatkan begitu besarnya rasa hormat masyarakat DIY terhadap Kasultanan dan Kadipaten. Sensitivitas isu tersebut membuat peneliti tidak mengambil risiko untuk mendalami secara daring sikap terhadap Kadipaten. Selain itu, keterbatasan waktu dan kesempatan dalam penelitian daring ini juga tidak dapat memperdalam dinamika antara partisipan dengan warga mereka, atau dengan keluarga mereka.

Simpulan

Ketaatan kepala dukuh terdampak untuk menerima YIA adalah hasil dari pembenaran sistem yang melatarbelakangi pembangunan bandara. Pola pikir utilitarian, teknokratik, dan birokratik menjadi acuan bagi mereka untuk mendukung atau tidak menolak pembangunan. Status subjektif tiap kepala dukuh memberikan perbedaan dalam tingkat ketergantungan terhadap pemerintah sehingga memunculkan perbedaan dalam menerima YIA. Kepala dukuh yang ketergantungannya terhadap pemerintah—melalui jabatan sebagai aparatur negara—stabil dalam waktu yang panjang lebih menerima pembangunan YIA. Sementara itu, kepala dukuh yang ketergantungannya tidak stabil cenderung menyayangkan pembangunan YIA. Setelah dampak YIA dianggap tidak sesuai dengan harapan, pembenaran sistem membuat partisipan yang lebih menerima pembangunan berusaha membenarkan keadaan yang ada. Di sisi lain, pembenaran sistem membuat kepala dukuh yang menyayangkan YIA berharap pada sistem kalurahan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan dan pola pikir penting dalam menentukan sikap terhadap kebijakan pembangunan. Penelitian selanjutnya mengenai pembenaran sistem diharapkan menelusuri lebih jauh peran teknokrasi dan birokrasi sebagai ideologi *system-justifying*, hubungan ideologi dengan status, serta hubungan ketergantungan dan status subjektif. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan kesesuaian antara latar belakang demografi partisipan dengan metode penelitian.

Penelitian ini memperlihatkan pada otoritas mengenai pentingnya menjamin kepentingan pihak terdampak dalam memunculkan ketaatan terhadap kebijakan. Bagi lembaga yang hendak melakukan advokasi dalam konflik agraria, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menekankan perlunya pemetaan kepentingan dari pihak-pihak terdampak. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan terkait pola pikir yang terbatas dalam melihat partisipasi politik.

Daftar Pustaka

- AJI Indonesia. (2021). *Data kekerasan tim advokasi AJI Indonesia*. Advokasi AJI Indonesia. <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1953.html?y=2021&m=1&ye=2021&me=9>
- Antoro, K. S. (2015). Analisis kritis substansi dan implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.31292/jb.v1i1.38>
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY. (2017, Maret 27). *New Yogyakarta International Airport (NYIA): Mewujudkan DIY sebagai daerah tujuan wisata dan budaya kelas dunia*. <http://bappeda.jogjapro.go.id/download/download/379>
- Brandt, M. J. (2013). Do the disadvantaged legitimize the social system? A large-scale test of the status-legitimacy hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104(5), 765–785. <https://doi.org/10.1037/a0031751>
- Brannigan, A., & Perry, G. (2016). Milgram, genocide and bureaucracy: a post-weberian perspective. *State Crime Journal*. <https://doi.org/10.13169/statecrime.5.2.0287>
- Centers for Disease Control and Prevention (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19)*. Wayback Machine, Internet Archives. <https://web.archive.org/web/20200601080217/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html>
- Chu, D. K., Akl, E. A., Duda, S., Solo, K., Yaacoub, S., Schünemann, H. J., Chu, D. K., Akl, E. A., El-harakeh, A., Bognanni, A., Lotfi, T., Loeb, M., Hajizadeh, A., Bak, A., Izcovich, A., Cuello-Garcia, C. A., Chen, C., Harris, D. J., Borowiack, E., ... Schünemann, H. J. (2020). Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 395(10242), 1973–1987. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31142-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9)
- Google. (2023a). [Tangkapan layar Bapangan]. <https://www.google.com/maps/place/Bapangan,+Glagah,+Temon,+Kulon+Progo+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.8970369,110.0617496,1319m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2e7ae3f685323d93:0x10a1b444b0c5240!8m2!3d-7.8971624!4d110.0624605!16s%2Fg%2F11ghndjdk5?entry=ttu>
- Google. (2023b). [Tangkapan layar Kepek]. <https://www.google.com/maps/place/Kepek,+Glagah,+Temon,+Kulon+Progo+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.8960803,110.0612385,1111m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2e7ae3f6f41f6a37:0xa04854eb1472d284!8m2!3d-7.8965911!4d110.0609716!16s%2Fg%2F11g0gc63j4?entry=ttu>
- Google. (2023c). [Tangkapan layar Kragon 2]. <https://www.google.com/maps/place/Kragon+2,+Palihan,+Temon,+Kulon+Progo+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.9002918,110.0542419,2816m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2e7ae3fa3e9ebe45:0x7b15e7edfa4da082!8m2!3d-7.9010999!4d110.0546438!16s%2Fg%2F11g0gc65dq?entry=ttu>
- Google. (2020). [Tangkapan layar salah satu perumahan reloasi]. https://earth.google.com/web/search/Temon,+Kulon+Progo+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.90010967,110.07497991,7.0786599a,748.01692209d,35y,101.94295002h,0t,0r/data=CigiJgokCSFOdGbYv0hAEaShZBl3ukhAGUukdgrY4l3AIYewGUw_6l3AOgMKATA

- Corcoran, K. E., Pettinicchio, D., & Young, J. T. N. (2015). Perceptions of structural injustice and efficacy: Participation in low/moderate/high-cost forms of collective action. *Sociological Inquiry*, 85(3), 429–461. <https://doi.org/10.1111/soin.12082>
- Crossley, M. (2007). Narrative analysis. In E. Lyons & A. Coyle (Eds.), *Analysing qualitative data in psychology* (pp. 131–144). SAGE Publications, Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446207536.d16>
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dewi, N. L. G. M. P., & Salim, M. N. (2020). *Berakhir di Temon: Perdebatan panjang pengadaan tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)*. STPN Press. https://www.researchgate.net/publication/346424596_Berakhir_di_Temon_Perdebatan_Panjang_Pengadaan_Tanah_untuk_New_Yogyakarta_International_Airport_YIA
- Douglas, K. R. (2016). *Barriers to social change: Neoliberalism and the justification of the status-quo among low-income African Americans* [Thesis, University of Missouri-Kansas City]. <https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/49784>
- Durrheim, K., Jacobs, N., & Dixon, J. (2014). Explaining the paradoxical effects of intergroup contact: Paternalistic relations and system justification in domestic labour in South Africa. *International Journal of Intercultural Relations*, 41, 150–164. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.11.006>
- Edita, E. P. (2019). *Aerotropolis: at what cost, to whom? An analysis of social and environmental impacts of New Yogyakarta International Airport (NYIA) project, Indonesia* [Thesis, Lund University]. <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8980037>
- Fossati, D. (2018). A Tale of three cities: Electoral accountability in Indonesian local politics. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 23–49. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345>
- Godfrey, E. B., & Wolf, S. (2016). Developing critical consciousness or justifying the system? A qualitative analysis of attributions for poverty and wealth among low-income racial/ethnic minority and immigrant women. *Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology*, 22(1), 93–103. <https://doi.org/10.1037/cdp0000048>
- Habibi, M., & Juliawan, B. H. (2018). Creating surplus labour: Neo-liberal transformations and the development of relative surplus population in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 649–670. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1429007>
- Hadiz, V. (2022). *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haekal, L. (2020). Ekspansi geografis dan perampasan lahan: Sisi lain pembangunan Yogyakarta International Airport. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 31–52. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.31-52>
- Harkin, D. (2015). Police legitimacy, ideology and qualitative methods: A critique of procedural justice theory. *Criminology & Criminal Justice*, 15(5), 594–612. <https://doi.org/10.1177/1748895815580397>
- Haryanto, H. C., Rahmania, T., Mubarak, A. R., Dopo, A. B., Fauzi, H., & Fajri, E. (2015). Bagaimanakah persepsi keterpercayaan masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3). <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>
- Hennes, E. P., Nam, H. H., Stern, C., & Jost, J. T. (2012). Not all ideologies are created equal: Epistemic, existential, and relational needs predict system-justifying attitudes. *Social Cognition*, 30(6), 669–688. <https://doi.org/10.1521/soco.2012.30.6.669>
- Hiles, D., Čermák, I., & Chrz, V. (2017). Narrative inquiry. In C. Willig & W. S. Rogers (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (2nd ed., pp. 157–175). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781526405555>

- Hooghe, M., & Marien, S. (2013). A comparative analysis of the relation between political trust and forms of political participation in Europe. *European Societies*, 15(1), 131–152. <https://doi.org/10.1080/14616696.2012.692807>
- Jost, J. T. (2017). Working class conservatism: A system justification perspective. *Current Opinion in Psychology*, 18, 73–78. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.08.020>
- Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: questions, answers, criticisms, and societal applications. *British Journal of Social Psychology*, 58(2), 263–314. <https://doi.org/10.1111/bjso.12297>
- Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. *British Journal of Social Psychology*, 33(1), 1–27. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1994.tb01008.x>
- Jost, J. T., Banaji, M. R., & Nosek, B. A. (2004). A Decade of System Justification Theory: Accumulated Evidence of Conscious and Unconscious Bolstering of the Status Quo. *Political Psychology*, 25(6), 881–919. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00402.x>
- Jost, J. T., & Hunyady, O. (2005). Antecedents and consequences of system-justifying ideologies. *Current Directions in Psychological Science*, 14(5), 260–265. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00377.x>
- Kamim, A. B. M. (2021). Hegemoni dan ekonomi politik dana keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta [Hegemony and political economy of privileged fund in Special Region of Yogyakarta]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 12(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2483>
- Kay, C. D. (2018). Utilitarianism. In A. Farazmand (Ed.), *Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance* (pp. 6086–6091). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9_2399
- Kosonen, P., Ikonen, M., & Savolainen, T. (2022). The shaking nest of trust: A case study of funding reform in a higher education organization. *Journal of Trust Research*, 12(1), 43–65. <https://doi.org/10.1080/21515581.2022.2085733>
- Lerman, A. E., & McCabe, K. T. (2017). Personal experience and public opinion: A theory and test of conditional policy feedback. *The Journal of Politics*, 79(2), 624–641. <https://doi.org/10.1086/689286>
- Li, W., Yang, Y., Wu, J., & Kou, Y. (2020). Testing the status-legitimacy hypothesis in China: objective and subjective socioeconomic status divergently predict system justification. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 46(7), 1044–1058. <https://doi.org/10.1177/0146167219893997>
- Lu, J., Gu, J., Li, K., Xu, C., Su, W., Lai, Z., Zhou, D., Yu, C., Xu, B., & Yang, Z. (2020). COVID-19 Outbreak associated with air conditioning in restaurant, Guangzhou, China, 2020. *Emerging Infectious Diseases*, 26(7), 1628–1631. <https://doi.org/10.3201/eid2607.200764>
- Luthfi, A. N. (2019). Perubahan politik agraria di Yogyakarta: dari reforma agraria ke kontra reforma. In M. Shohibuddin & A. D. Bahri (Ed.), *Perjuangan keadilan agraria* (pp. 73–90). https://www.academia.edu/45592913/Luthfi_2019_Perubahan_Politik_Agraria_di_Yogyakarta_Dari_Reforma_Agraria_ke_Kontra_Reforma
- Ma, B., Liu, S., Liu, D., & Wang, H. (2016). Job security and work performance in Chinese employees: The mediating role of organisational identification. *International Journal of Psychology*, 51(2), 123–129. <https://doi.org/10.1002/ijop.12137>
- Major, B., Kaiser, C. R., O'Brien, L. T., & McCoy, S. K. (2007). Perceived discrimination as worldview threat or worldview confirmation: Implications for self-esteem. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(6), 1068–1086. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1068>

- Meyer, M. (2021). Putting the onus on authority: A review of obedient behavior and why we should move on. *New Ideas in Psychology*, 60, 100831. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100831>
- Milfont, T. L., Osborne, D., & Sibley, C. G. (2022). Socio-political efficacy explains increase in New Zealanders' pro-environmental attitudes due to COVID-19. *Journal of Environmental Psychology*, 79, 101751. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101751>
- Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: an experimental view*. Tavistock Publications Ltd. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=e3e4dafce6ed37a2286a017e61c4b724>
- Murray, M. (2003). Narrative psychology. In J. A. Smith (Ed.), *Qualitative psychology: A practical guide to research methods* (pp. 111–131). London: Sage.
- Nam, H. H., Jost, J. T., & Bavel, J. J. V. (2013). "Not for all the Tea in China!" Political ideology and the avoidance of dissonance-arousing situations. *PLOS ONE*, 8(4), e59837. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059837>
- Neal, T. M. S., Shockley, E., & Schilke, O. (2016). The "dark side" of institutional trust. In E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig, & B. H. Bornstein (Eds.), *Interdisciplinary perspectives on trust: towards theoretical and methodological integration* (pp. 177–191). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22261-5_10
- Ngusmanto, N. (2016). Pilkada 2015 and patronage practice among bureaucrat in west kalimantan, Indonesia. *Asian Social Science*, 12(9). <https://doi.org/10.5539/ass.v12n9p236>
- Paripurno, E. T., Nugroho, A. R. B., & Nugroho, N. (2015). Kajian peningkatan risiko bencana tsunami di Pantai Selatan Kulon Progo—Yogyakarta. *Proseding Simposium Nasional Mitigasi Bencana Tsunami*. https://www.academia.edu/23716719/Kajian_Peningkatan_Risiko_Bencana_Tsunami_di_Pantai_Selatan_Kulon_Progo_Yogyakarta
- Rachman, N. F., & Yanuardy, D. (2015). Dapatkah Indonesia bebas dari kutukan kolonial? Refleksi kritis atas MP3EI. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2). <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i2.94>
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Scott, J. (2015). Technocracy. In *A dictionary of sociology* (4th ed., pp. 1034). Oxford University Press.
- Takashi, S. (2014). Indonesian technocracy in transition: a preliminary analysis. *Southeast Asian Studies*, 3(2), 255–281. https://doi.org/10.20495/seas.3.2_255
- Vainio, A., Mäkinen, J.-P., & Paloniemi, R. (2014). System justification and the perception of food risks. *Group Processes & Intergroup Relations*, 17(4), 509–523. <https://doi.org/10.1177/1368430213503502>
- Valdes, E. A., Liu, J. H., & Williams, M. (2022). Testing the status-legitimacy hypothesis: Predicting system justification using objective and subjective socioeconomic status in China and the United States. *Asian Journal of Social Psychology*. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12555>
- van der Toorn, J., Feinberg, M., Jost, J. T., Kay, A. C., Tyler, T. R., Willer, R., & Wilmuth, C. (2015). A sense of powerlessness fosters system justification: Implications for the legitimation of authority, hierarchy, and government. *Political Psychology*, 36(1), 93–110. <https://doi.org/10.1111/pops.12183>
- van der Toorn, J., Tyler, T. R., & Jost, J. T. (2011). More than fair: Outcome dependence, system justification, and the perceived legitimacy of authority figures. *Journal of Experimental Social Psychology*, 47(1), 127–138. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.09.003>
- Vargas-Salfate, S., Paez, D., Liu, J. H., Pratto, F., & Gil de Zúñiga, H. (2018). A comparison of social dominance theory and system justification: The role of social status in 19 Nations. *Personality & Social Psychology Bulletin*, 44(7), 1060–1076. <https://doi.org/10.1177/0146167218757455>

- Weber, M. (2015). Bureaucracy. In T. Waters & D. Waters (Eds.), *Weber's rationalism and modern society: new translations on politics, bureaucracy, and social stratification* (pp. 73–132). Palgrave Macmillan US. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=789a5f63ba45579a2b518d64c91a720c>
- Weeden, J., & Kurzban, R. (2017). Self-interest is often a major determinant of issue attitudes. *Political Psychology*, 38(S1), 67–90. <https://doi.org/10.1111/pops.12392>
- Wilkinson-Ryan, T. (2020). Justifying bad deals. *University of Pennsylvania Law Review*, 169(193). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3532442>
- Zeng, R., Chen, Y., & Li, H. (2018). Participation in collective action in China: unfair experience, interests involved, and political efficacy. *Social Behavior and Personality: an International Journal*, 46(9), 1561–1572. <https://doi.org/10.2224/sbp.7117>
- Zhang, S., & Zhou, J. (2018). Social justice and public cooperation intention: Mediating role of political trust and moderating effect of outcome dependence. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01381>